SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh :

GALIH YANUAR MEDI P., SE., M.Si.

DASAR HUKUM SAKIP

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Latar Belakang SAKIP

a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SIKLUS SAKIP

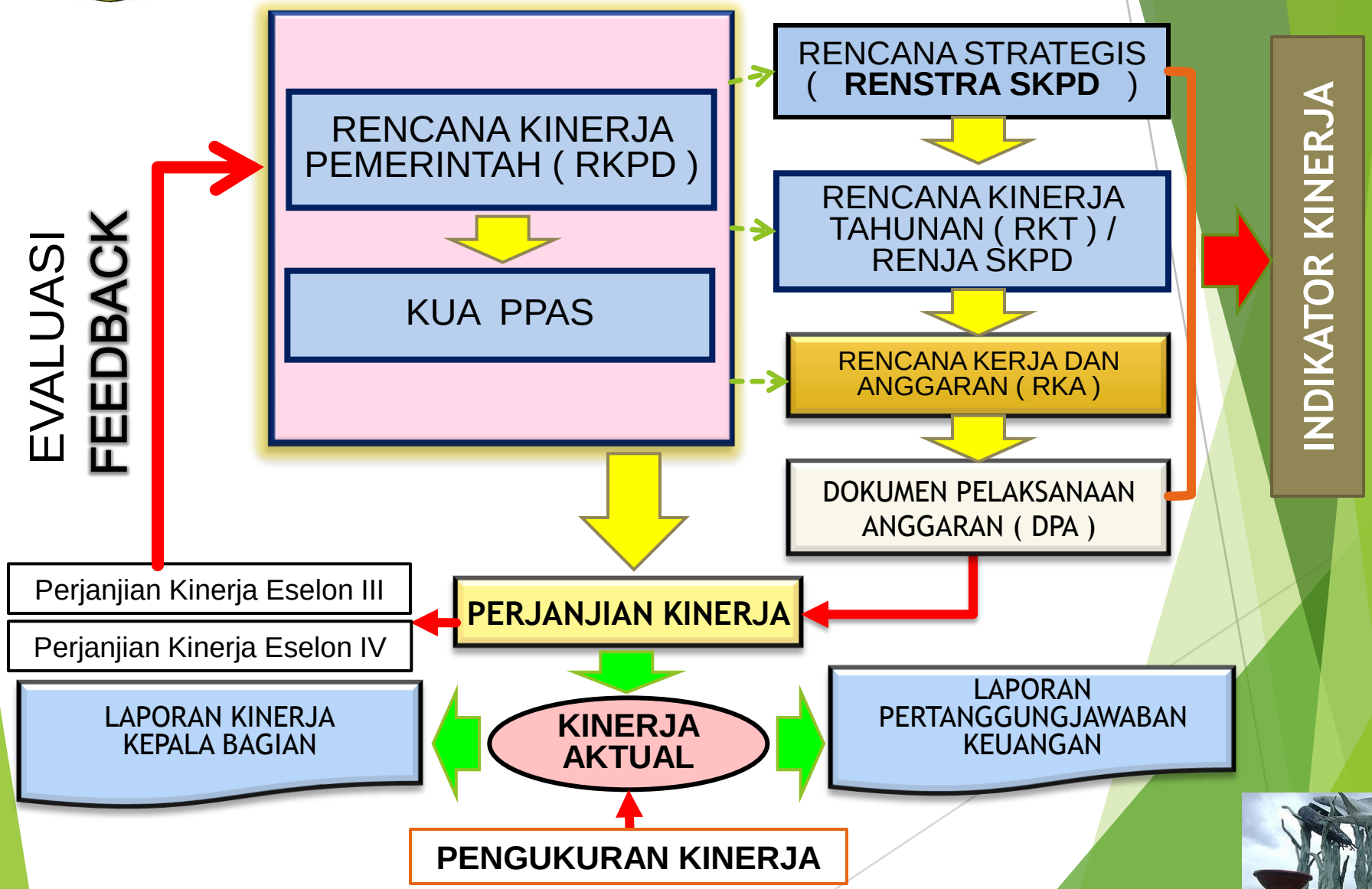

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE

PRINSIP PENGADAAN

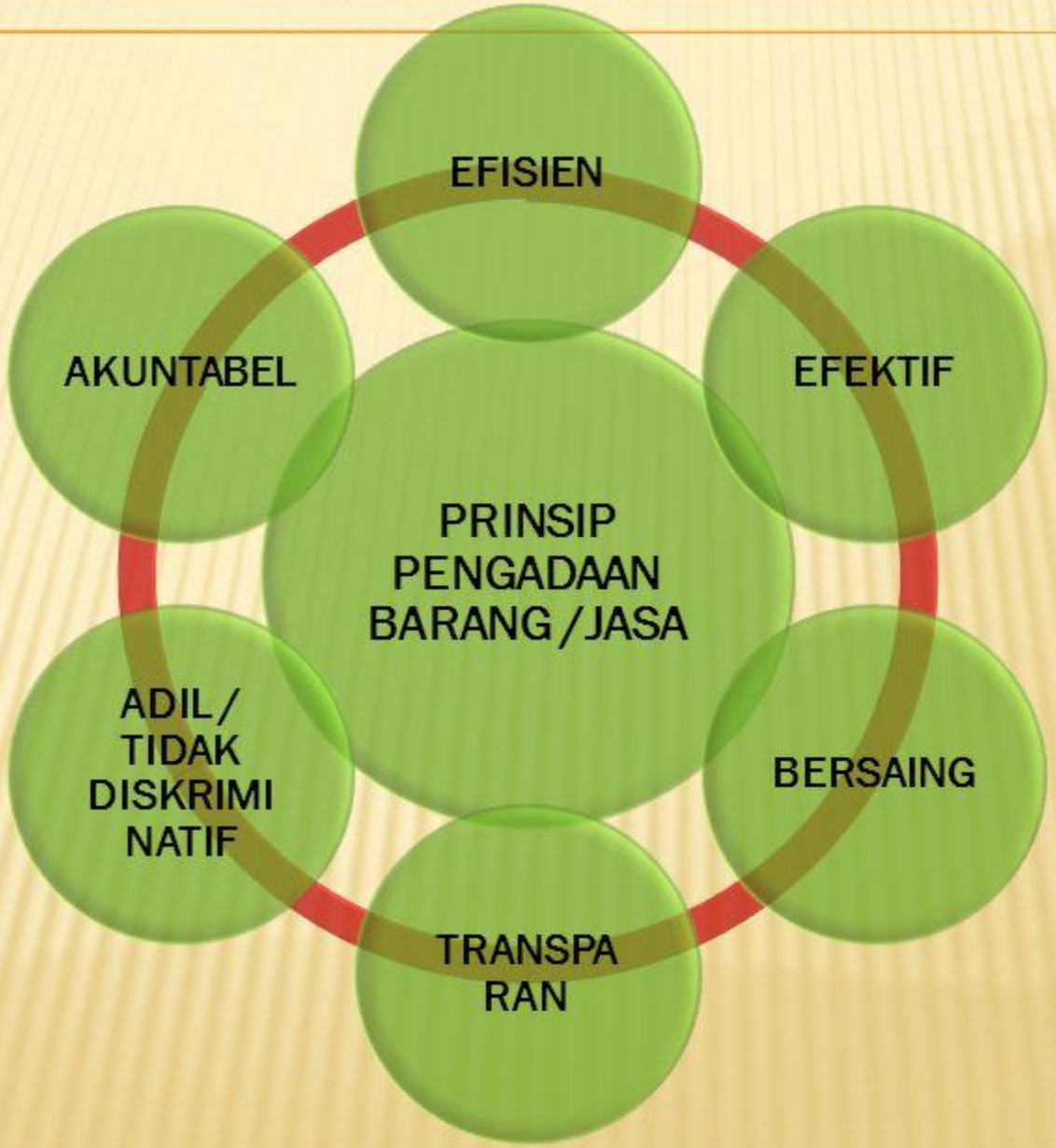

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021

No.	Indikator	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun **TIDAK ADA** ---------- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun **TIDAK ADA**	Bagian Administrasi Pembangunan
2	Jumah total Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-procurement Tahun 2021 sebanyak 146 Paket	Jumlah pengadaan yang dilakukan melalui metode kompetitif 146 paket ----------X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 146 paket	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

INTEGRASI PERENCANAAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Target
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	150 dokumen
2	Pembinaan dan Advokasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	225 orang
3	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	73 dokumen

CASCADING BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA. KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

TUJUAN RPJMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Indikator : Nilai LPPD, Nilai SAKIP dan IKM

↓

ESELON II

Terwujudnya kebijakan strategis yang dirumuskan bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator : Prosentasi kebijakan yang dirumuskan bidang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan

↓

ESELON III

Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Indikator : Prosentase Kebijakan Strategi Bidang Perkonomian yang di Fasilitasi

↓

Lanjutan.....

FUNGSIONAL

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indikator ; Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(150 dokumen)

1. Menyiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tingkat PD

Indikator ; Jumlah dokumen rencana umum pengadaan

2. Memproses Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator ; Jumlah Pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan

3. Melaksanakan inventarisasi pengadaan barang dan jasa

Indikator ; jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai diproses sesuai dengan ketentuan

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Indikator ; Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mendapatkan Pembinaan dan Advokasi (225 orang)

1. Pembinaan, Pendampingan Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang dan jasa

Indikator ; Jumlah pelaku dan pengelola yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan PBJ

2. Menyusun dan menyiapkan dokumen SAKIP

Indikator ; Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun

3. Menyusun dan melaporkan IKM, LKjIP dan LPPD

Indkator ; Jumlah LKjIP dan LPPD yang tersusun

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Indikator ; Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (73 dokumen)

1. Memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Indikator ; Jumlah dokumen yang hasil layanan pengadaan secara Elektronik

2. Membuat informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Indikator ; Jumlah informasi tentang PBJ secara elektronik

PROSES BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

SUPPLIER
Perangkat Daerah

IN PUT
Anggaran

MENEJERIAL

M.01
Perencanaan Program dan Kegiatan
Verifikasi Rencana Umum Pengadaan

M.02
Pengelolaan keuangan
Menyusun Anggaran APBD 2021 & 2022

M.03
Melaksanakan Program dan Kegiatan
Proses Pengadaan PBJ, Pembinaan, Pelatihan dan Pendampingan

M.04
Manajemen Pengawasan
Pengawasan dan Evaluasi Internal

UTAMA

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

OUT PUT
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui SPSE yg Sesuai Ketentuan

CUSTOMER
Pihak ke 3 dan Masyarakat Lamongan

PENDUKUNG

P 1.
Tersedianya Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan manajemen Pengadaan Barang/Jasa (SIPALA)

P 2.
Tersedianya SDM dan peran serta Pihak Ke 3

P 3.
Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang Kompetitif.

PROSES BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Setelah Refocusing

SUPPLIER
Perangkat Daerah

IN PUT
Anggaran

MENEJERIAL

M.01
Perencanaan Program dan Kegiatan
Verifikasi Rencana Umum Pengadaan secara daring

M.02
Pengelolaan keuangan
Menyusun Anggaran APBD 2021 & 2022

M.03
Melaksanakan Program dan Kegiatan
Proses Pengadaan PBJ dan Pendampingan secara daring

M.04
Manajemen Pengawasan
Pengawasan dan Evaluasi Internal

UTAMA

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

OUT PUT
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui SPSE yg Sesuai Ketentuan

CUSTOMER
Pihak ke 3 dan Masyarakat Lamongan

PENDUKUNG

P 1.
Tersedianya Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan manajemen Pengadaan Barang/Jasa (SIPALA)

P 2.
Tersedianya SDM dan peran serta Pihak Ke 3

P 3.
Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang Kompetitif

PROSES BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Level 0

MENINGKATNYA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 100% YANG SESUAI KETENTUAN

Level 1

TERLAKSANANYA PELAYANANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 100% YANG SESUAI KETENTUAN

Level 2

- Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik LPSE

Level 3

- Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Proses Pengadaan Barang/Jasa

LANJUTAN.....

TERLAKSANANYA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 100% YANG SESUAI KETENTUAN

- Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik LPSE

Level 3

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

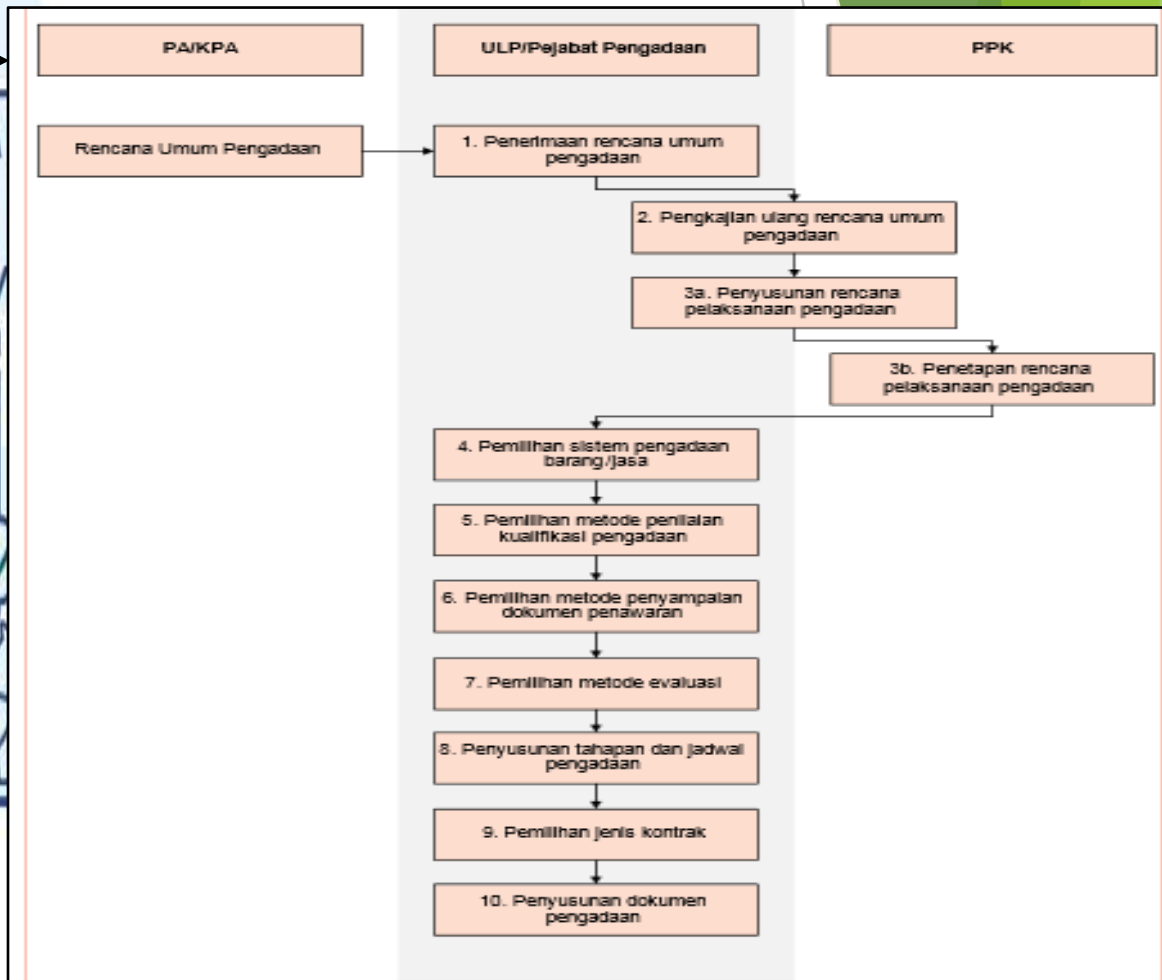

LANJUTAN.....

TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SESUAI KETENTUAN

- Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa
  - Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  - Proses Pengadaan Barang/Jasa
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik LPSE

Level 3

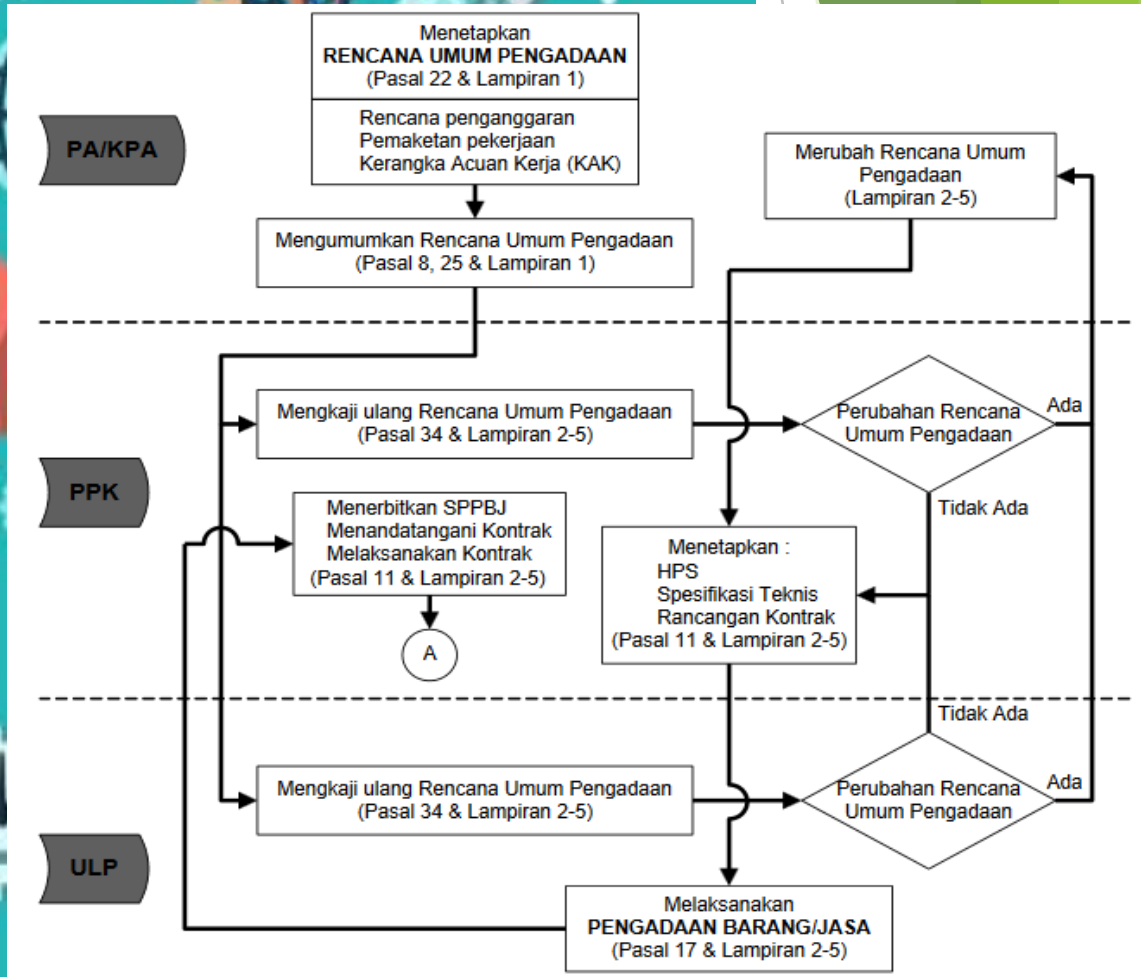

LANJUTAN.....

TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SESUAI KETENTUAN

Level 3

Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa

- Pendampingan PPK dan Pejabat Pengadaan di 73 PD Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa
- Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Penyusunan Rancangan Kontrak
- Pembuatan Draft Paket Tender

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Pembinaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
- Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa
- Pembuatan paket Tender
- Study Tiru (Study banding)
- Pelatihan Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik LPSE

- Memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara On Line
- Mengelola Informasi manajemen Pengadaan Barang/Jasa
- Mengelola Informasi Database PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

LOGIC MODEL

LEVEL 0	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	
Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dengan di dukung kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan	Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	.1	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
					3.	Menyusun daftar paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di setiap organisasi perangkat daerah
					4.	menyediakan dan mengelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis sitem pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) yang dilakukan olehkelompok kerja layanan pengadaan
					5.	menyediakan berbagai informasi kepada masyarakat/instansi lainnya terkait dengan pengadaan barang/jasa
					6.	melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Administrasi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
				Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	.1	Undangan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
					.2	Melakukan Pelatihan dan pendampingan terhadap PD tentang Pengadaan Barang dan Jasa
					.3	Koordinasi dan sinkronisasi dengan PPK dan Pejabat Pengadaan di Seluruh PD
					.4	Laporan hasil Pembinaan
				Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	1.	Pendataan nama PPK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh PD
					2.	Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa
					3.	Mengelola informasi manajemen Barang/Jasa hasil pengadaan

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Target			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Prosentase Kebijakan Strategi Bidang Perkonomian yang di Fasilitasi	100%	5%	60%	35%	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	8 Dokumen	90 Dokumen	52 Dokumen	-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	225 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	-
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	73 Dokumen	73 Dokumen	73 Dokumen	73 Dokumen	-

POHON KINERJA

KABUPATEN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
M I S I	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Sasaran program**	Target : 100% (73 PD) **Indikator Kinerja program**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**INPUT**
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik	Prosentase kebijakan yang dirumuskan Target : 100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Prosentase Pengadaan Barang/ Jasa yang dilelang Secara Online	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Target : 100% (150 dokumen)	710.064.600
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Target : 225 orang	529.140.500
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah OPD yg Mendapatkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Target : 73 Dokumen	445.159.100

MITIGASI RESIKO

Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang ada	Rencana Tindak Pengendalian
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang belum maksimal	Sarana dan Prasana yang masih terbatas	Hasil pembangunan tidak tepat waktu	Melakukan Koordinasi dengan PD	Penekanan Tugas Kepada Kepala PD
Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai perencanaan	Kurangnya pemahaman proses pengadaan barang/jasa	Opini atas proses pengadaan barang/jasa menurun	Pendampingan proses pengadan barang/jasa	Peningkatan intensitas Pendampingan proses pengadaan barang/jas
Pengiriman administrasi proses Pengadaan Barang/Jasa tidak tepat waktu	masih banyak perencanaan yang belum selesai di pihak PD	Terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/jasa	Melakukan koordinasi dengan PD	Melakukan monitoring dan evaluasi kepada PD
Data administrasi proses Pengadaan Barang/Jasa masih kurang maksimal	Terbatasnya SDM Pengadaan Barang/Jasa	Data administrasi kurang sesuai dengan ketentuan	Melakukan koordinasi dengan PD	Membangun sistem aplikasi informasi pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan proses pengadaan barang/Jasa yang mendekati akhir tahun	Pihak PD menyesuaikan jadwal cashbudgeting	pelaksanaan pekerjaan yang dipaksa	melakukan koordinasi dengan PD	melakukan monitoring dan evaluasi kepada PD

CASCADING

TUJUAN RPJMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Indikator : Nilai LPPD, Nilai SAKIP dan IKM

ESELON II

Terwujudnya kebijakan strategis yang dirumuskan bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator : Prosentasi kebijakan yang dirumuskan bidang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan

ESELON III

Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Indikator : Prosentase Kebijakan Strategi Bidang Perkonomian yang di Fasilitasi

FUNGSIONAL

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indikator ; Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(150 dokumen)

1. Menyiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tingkat PD

Indikator ; Jumlah PD yang membuat rencana umum pengadaan

2. Memproses Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator ; Jumlah Pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan

3. Melaksanakan inventarisasi pengadaan barang dan jasa

Indikator ; jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai diproses sesuai dengan ketentuan

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pembinaan dan Advokasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Indikator ; Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mendapatkan Pembinaan dan Advokasi (225 orang)

1. Pembinaan, Pendampingan Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang dan jasa

Indikator ; Jumlah pelaku dan pengelola yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan PBJ

2. Menyusun dan menyiapkan dokumen SAKIP

Indikator ; Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun

3. Menyusun dan melaporkan LKjIP dan LPPD

Indkator ; Jumlah LKjIP dan LPPD yang tersusun dan dilaporkan

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Indikator ; Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (73 dokumen)

1. Memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Indikator ; Jumlah PD yang mendapatkan fasilitas PBJ secara Elektronik

2. Membuat informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Indikator ; Jumlah informasi tentang PBJ secara elektronik

2. STRUKTUR ORGANISASI
(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

GALIH YANUAR MP., Se.,M.Si.
NIP. 19800117 200312 1 003

KASUBAG. LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (LPSE)

EBID BENY PUTRA, S.Pt.,MM.
NIP. 19840927 200902 1 003

KASUBAG. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

FITRIASIH, ST.
NIP. 19820726 200604 2 016

ADHIE KURNIA DHARMAWAN, SE.
NIP. 19810905 201001 1 009

ANDHI OKTAVIANTO, ST.
NIP. 19771030 200902 1 006

PARTONO, A.Md.KL.
NIP. 19831023 201001 1 013

KASUBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA

JOKO ANDRIYANTO, A.Md. K.L., SKM.
NIP. 19780419 200604 1 016

RAHMAN YULIANTO, S.E.
NIP. 19780721 201001 1 016

NURUL HIDAYATUL LAIL, S.Sos.
NIP. 19840626 201001 2 001

ANA SUTOMO, S.Pt., MM.
NIP. 19860219 201001 2 010

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Pegawai 12 orang (1 pejabat struktural, 3 pejabat fungsional dan 8 staf)
terdiri dari :

- **Laki-laki : 5 Orang**
- **Perempuan : 7 Orang.**

	Jumlah	Column1	Column2		
ESELON II	0				
ESELON III	1				
FUNGSIONAL	3				
STAF	8				

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

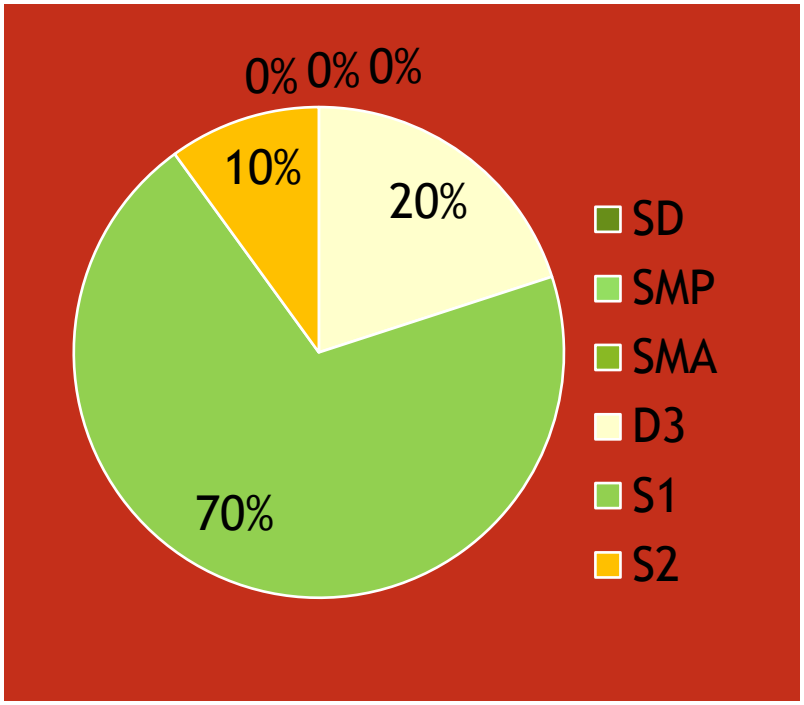

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

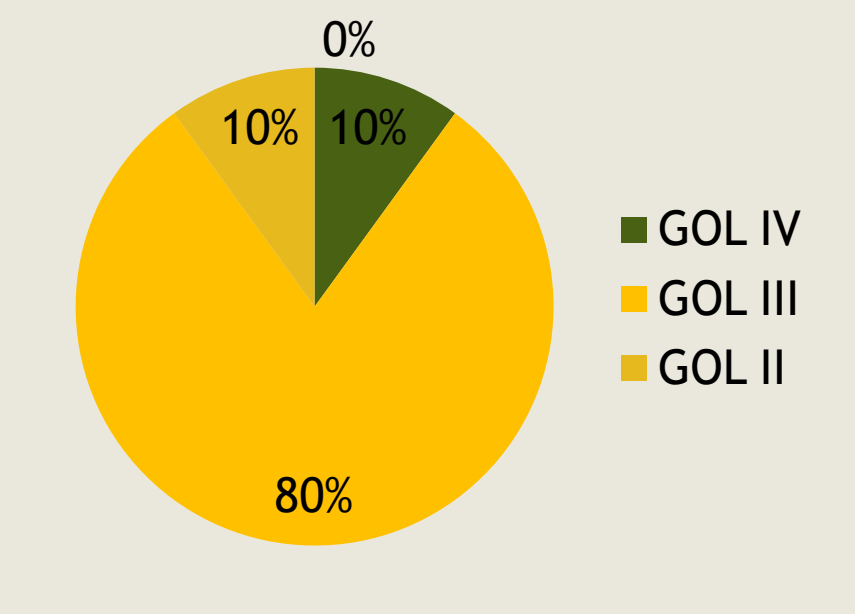

PROGRAM, KEGIATAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2022

Program Perekonomian dan Pembangunan, 1 kegiatan dengan 3 Sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

VISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LAMONGAN 2021-2026

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM	KEGIATAN
1	**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**	**Misi Ke-4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, berbasis Digita dan Bebas Korupsi, dengan memebrikan ruang yang luas bagi partisipasi Masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan**	**Tujuan Ke-4 :** Meningkatkan kinerja Aparatur dalam engadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah **3 Indikator Tujuan**	**Sasaran Ke-11 :** Terwujudnya penyeleng garaan pemerintahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yg efektif & efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yg lebih baik	**Indikator sasaran ke-16 :** Prosentase kebijakan yg dirumuskan		
		MISI SETDA	**TUJUAN SETDA**	**SASARAN SETDA**	**INDIKATOR SASARAN SETDA**	**PROGRAM SETDA**	**KEGIATAN LINGKUP SETDA**
		Misi Ke-3 SETDA **3.** Meningkatkan Pengelolaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Penday aguna an Aparatur, Pelay anan Publik, Keuanga n, Sarana & Pra sarana serta Kehumasan.	**Tujuan Ke-3 SETDA** 3. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pendaya gunaan Aparatur, Pelayanan Publik, Keuangan, Sarana & Prasa rana serta Kehumasan.	**Sasaran ke-9 SETDA :** 9. Mewujudkan sistem organisasi & manaje men pemerintah dae rah yg transparan, akuntabel, demokra- tif & partisipatif	**Asisten I :** -Bag.Pemerintahan ….. indikator -Bag.Admin Pemdes ….. indikator -Bag.Kemasy ….. indikator -Bag.Hukum ….. indikator **Lingkup Asisten II :** -Bag.Perekonomian ….. indikator -Bag.Admin Pemb. ….. indikator -Bag.Bina P.BUMD ….. Indikator -Bag. Peng. Barang/ Jasa	**Asisten I :** -Bag.Pemerintahan … **Program** -Bag.Admin Pemdes … **Program** -Bag.Kemasy … **Program** -Bag.Hukum … **Program** **Lingkup Asisten II :** -Bag.Perekonomian … **Program** -Bag.Admin Pemb. ….. **Program** **-Bag. Peng. Barang/ Jasa** **1 Program** -Bag.Bina P.BUMD … **Program**	**Lingkup Asisten I :** -Bag.Pemerintahan keg -Bag.Admin Pemdes keg -Bag.Kemasarakatan keg -Bag.Hukum keg **Lingkup Asisten II :** -Bag.Perekonomian keg -Bag.Admin Pembang keg **-Bag. Peng. Barang/jasa 1 Keg** -Bag.Bina Pengel BUMD keg **Lingkup Asisten III :** -Bag.Umum keg -Bag.Organisasi keg -Bag.Humas&Protokol keg -Bag.Bina Keuangan keg

VISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LAMONGAN 2021-2026

MISI BAG. PENG. BARANG / JASA	TUJUAN BAG. PENG. BARANG / JASA	SASARAN BAG. PENG. BARANG / JASA	INDIKATOR SASARAN BAG. PENG. BARANG / JASA	PROGRAM BAG. PENG. BARANG / JASA	KEGIATAN LINGKUP BAG. PENG. BARANG / JASA
1. Terwujudnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	1. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan.	1. Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang di lelang	1. Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Pembinaan dan Advokasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

PENGUKURAN KINERJA

- Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2022 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya terhadap ***target kinerja*** Tahun 2022.
- Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan memperoleh predikat **Sangat Berhasil,** dengan rata-rata sebesar **99,04%.**

PENGUKURAN KINERJA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal (2021) Perencanaan
1	2		3	4				5	6	7
meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah	1	Meningkatnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan	Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang di lelang	01	01	24		PROGRAM OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Outcame : Prosentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Online	100%
				01	01	24	01	**Pengelolaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**	Output : 1. Jumlah OPD yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan PBJ	76 OPD
				01	01	24	02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**	1. Jumlah OPD yang Mendapatkan fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	76 OPD
				01	01	24	03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	1. Jumlah pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan. 2. Jumlah pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mendapatkan Pembinaan dan	225 orang 15 Orang

Anggaran, realisasi dan pelaksanaan urusan wajib Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/ Jasa	Belanja Modal			
A	**OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**								
1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	200.337.600,00	-	56.800.000,00	138.238.849,00	-	200.325.149,00	12.452,00	99,99%
2	Pengelolaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	534.424.700,00	-	514.710.000,00	19.457.000,00	-	534.167.000,00	257.700,00	99,95%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	215.237.700,00	-	300.000,00	198.575.200,00	7.500.000,00	198.875.200,00	257.700,00	95,88%
	Total	**950.000.000,00**		**571.810.000,00**	**356.271.000,00**	7.500.000,00	**940.867.349,00**	**9.132.651,00**	**99,04%**
Jumlah Anggaran		**950.000.000,00**		**571.810.000,00**	**356.271.000,00**	7.500.000,00	**940.867.349,00**	**9.132.651,00**	**99,04%**

Monitoring Pengendalian Kegiatan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 dan 2021 Kabupaten Lamongan

No.	Tahun	Janis Tender				Jumlah Paket tender
		Konstruksi	Barang	Konsultan	Jasa Lainnya	
1	2018	180 paket	35 paket	33 paket	1 paket	249 Paket
2	2019	155 paket	37 paket	15 paket	1 paket	208 paket
3	2020	16 paket	40 paket	3 paket	4 paket	76 paket
4	2021	117 paket	23 paket	4 paket	2 paket	146 paket

GEOENSIKLOPEDIA
HARI INI
janusantaraphotography.com
TERIMA KASIH
SELAMAT DATANG
KABUPATEN LAMONGAN
LAMONGAN